

## LANJUT USIA: ANTARA TUNTUTAN JAMINAN SOSIAL DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN

*Eko Sriyanto*

Peneliti dan Fasilitator Waterplant NGO Yogyakarta

Email: sriyanto\_eko@yahoo.co.id

### ABSTRACT

Social service and social security for elderly in 2010 only covered 143.131 person (Direktorat PSLU, 2010) from expectation to serve 2,4 million elderly, whether it is poor and neglected elderly (BPS, 2010). Government capacity to serve social service and social security is limited, so it needs a new strategy to keep the sustainability of elderly's life. We must have alternative way to assist them to solve their psychosocial and physical vulnerability through empowerment scheme. The psychosocial vulnerability of elderly is vulnerability that comprise from economic, social and psychological aspects so that it needs comprehensive understanding to make a program for them. Empowering the elderly will create activity that will be advantageous for them to use the leisure, create social relationship, decrease felt of loneliness, keep reciprocal relationships with their social environment, increase income, and build their capacity in both health and skills. The development of a sense of empowerment must consider several aspects, including environmental characteristics, social-demographic structures, and cross-generational actors. Alternatives for empowerment programs include productive activities (care housing and non-care housing) and social activities (volunteering).

*Keywords: Elderly, Social Security, Empowerment, Psychosocial Vulnerability*

### ABSTRAK

Pelayanan sosial dan jaminan sosial bagi lansia (PSJSLU) hingga tahun 2010 hanya mampu menjangkau 143.131 lansia (Direktorat PSLU,2010) dari ekspektasi melayani 2,4 juta jiwa lansia miskin dan terlantar (BPS, 2010). Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan PSJSLU bagi seluruh lansia, maka diperlukan terobosan baru untuk menjaga keberlanjutan kehidupan lansia. Salah satu alternatif untuk membantu lansia mengatasi kerentanan psikososial dan fisiknya melalui skema pemberdayaan. Kerentanan psikososial lansia meliputi aspek ekonomi, sosial dan psikologis sehingga perlu pemahaman komprehensif dalam merencanakan skema program bagi lansia. Pemberdayaan lansia membentuk pola aktivitas lansia yang bermanfaat mengisi waktu luang, menciptakan hubungan sosial, mengurangi perasaan kesendirian, menjaga hubungan timbal-balik antara lansia dengan lingkungannya, menambah pendapatan, menjaga eksistensi diri dan meningkatkan kapasitas terkait kesehatan maupun ketrampilan lansia. Pola pemberdayaan yang dikembangkan harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti potensi karakter wilayah, struktur sosial demografi dan pelaku lintas generasi. Alternatif program pemberdayaan lansia melalui usaha produktif (panti dan non-panti) dan aktivitas sosial (sukarelawan).

*Kata Kunci: Lansia, Jaminan Sosial, Pemberdayaan, Kerentanan Psikososial.*

### PENGANTAR

Kesejahteraan selalu menjadi kajian penting dalam kehidupan berkebangsaan. Pencapaian atas kesejahteraan masyarakat

suatu negara adalah tujuan utama sebuah pemerintahan. Negara kesejahteraan merupakan sebuah ideologi kenegaraan untuk menunjukkan arah pencapaian negara

yang berorientasi pada upaya pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu bentuk perwujudan kebijakan negara kesejahteraan adalah adanya skema perlindungan sosial yang diimplementasikan melalui jaminan sosial.

Penyusunan skema jaminan sosial memang bukan sesuatu yang sederhana karena harus memperhatikan kompleksitas aspek. Jaminan sosial tidak hanya penting pada aspek kebudayaan, sosial, ekonomi, isu politik, dan hukum, tetapi jaminan sosial adalah aspek yang integral dari kehidupan sosial dan ekonomi serta inti dalam memahami organisasi dan perubahan sosial (Benda-Beckman, 2000:8). Terdapat beberapa komponen yang harus menjadi pertimbangan, seperti kelompok sasaran, jenis kerentanan yang mungkin dialami, prinsip, azas, dan *stakeholder* yang terlibat dalam penyediaan jaminan sosial tersebut.

Perubahan aspek demografis menjadi salah satu penyebab kerentanan yang mewajibkan negara memiliki pola penanganan persoalan kerentanan tersebut. Salah satu fenomena aktual di Indonesia adalah tingginya laju jumlah usia lanjut. Konsekuensi logis bahwa ledakan penduduk usia lanjut akan menjadi permasalahan pada negara yang tidak memiliki perencanaan menghadapi keadaan tersebut. Aspek demografi merupakan poin penting dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang akan menjadi kebijakan sebuah negara. Jumlah penduduk usia lanjut tahun 2010 mencapai 18,96 juta orang atau 8,42% dari jumlah penduduk Indonesia (Deputi Urusan Perempuan, Lansia dan Penyandang Cacat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010, dalam KR, 2010). Persoalan populasi lansia meliputi berbagai aspek, menurut Bryan S. Turner, yaitu:

*"Ageing and age groups are demarcated not only by economic and political practices, but also by specific life-styles, a cultural habitus and dispositions which differentiate them from other, competing social group"* (Turner, 1989:540)

Perkembangan jumlah lansia ini akan mempengaruhi pola pelayanan sosial maupun pelayanan publik yang harus disediakan negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, terutama lansia. Keadaan tersebut telah digambarkan oleh banyak penulis, dimana telah menganalisis populasi lansia akan berdampak pada ukuran sistem jaminan sosial dalam pengaturan antar generasi (Casamatta, 2000; Tabellini, 2000; Breyer and Stolte, 2001; Wigger, 2001, dalam Hirazawa, Kitaura, Yakita. 2007: 560).

Suatu hal ironis ketika salah satu indikator keberhasilan pembangunan sebuah negara yaitu meningkatnya angka harapan hidup (*life expectancy*) harus menjadi bumerang bagi negara itu sendiri. Sisi positif dan negatif dari fenomena perkembangan jumlah lansia ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Penurunan kondisi fisik dan psikososial lansia menyebabkan lansia mengalami penurunan beraktivitas, sehingga lansia dianggap tidak lagi mampu produktif dan menjadi beban negara. Anggapan umum ini tidak sepenuhnya benar karena masih banyak lansia yang aktif bekerja. Walaupun demikian, jumlah lansia terlantar masih cukup tinggi dan banyak lansia miskin yang hidup dalam kekurangan. Lansia yang masih aktif bekerja pun biasanya mereka bekerja di sektor informal dan berpendapatan rendah, sehingga mereka sangat rentan dengan keadaan *insecurity*.

Skema jaminan sosial bagi lansia di Indonesia belum mencakup seluruh lansia yang berpotensi mengalami kerentanan (lansia miskin dan terlantar). Program jaminan sosial bagi lansia dari Departemen Sosial yang disebut Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dengan memberikan santunan sebesar Rp300.000,00 setiap bulan kepada lansia terlantar dan miskin ini masih sangat terbatas. Jangkauan jaminan sosial pada tahun 2010 hanya 10.000 lansia, padahal jumlah lansia miskin dan terlantar mencapai 2,4 juta jiwa (BPS, 2010, dalam Sitepu, 2010),

dengan kata lain jangkauannya kurang dari 1 persen lansia terlantar.

Program JSLU berbeda dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) karena berlaku hingga lansia ini tutup usia. Selain dari sisi waktu pemberian bantuannya, penerima JSLU tidak harus mengambil di kantor pos tetapi ada petugas yang mengantarkan bantuan langsung ke rumah sasaran. Program ini telah berjalan 5 tahun dan sebagai proyek percontohan di 28 propinsi. Syarat lansia yang akan memperoleh JSLU antara lain mereka yang hidup sangat bergantung pada bantuan orang lain atau hanya bisa berbaring di tempat tidur (*badridden*), diutamakan yang berusia 70 tahun ke atas, sakit-sakitan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Penyaluran bantuan menjadi kendala utama, khususnya di daerah terpencil atau terpelosok, seperti terjadi di Bandung dan beberapa wilayah Jawa Barat (Societa, 2011:11-15)

Program lain untuk menjaga kualitas hidup lansia yaitu melalui Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW), Dekon, Pusaka dan organisasi sosial. Pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia sejak tahun 2010 telah mengalami peningkatan, sebanyak 56.041 lanjut usia terlayani, dan 2.746 lembaga/instansi telah melayani lansia (Dir. Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2010, dalam Yanrehsos, 2010). Keseluruhan lansia yang telah mendapat pelayanan sosial dari berbagai program, baik melalui PSTW, luar panti, dekonsentrasi dan uji coba PLJSU sebanyak 143.131 jiwa (Dir. Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2010; dalam Yanrehsos, 2010). Pada saat dikomparasikan dengan jumlah lansia terlantar, jumlah lansia penerima pelayanan sosial masih sangat kecil.

Kajian tentang lansia telah banyak dilakukan sebelumnya. Riset aksi PHK-A3 Jurusan Ilmu Sosiatri (2008) melakukan penelitian mengenai pemberdayaan lansia melalui pengembangan usaha tenun. Lansia bersama dengan kelompok usia produktif membentuk sebuah kelompok tenun dan

mencoba mengembangkan jenis produksi (Tim Peneliti Jurusan Ilmu Sosiatri, 2008). Penelitian mengenai lansia pernah dilakukan penulis (Sriyanto, 2009) dengan fokus pengembangan jaminan sosial informal, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa lansia perdesaan memiliki pola jaminan sosial informal yang berbasis masyarakat, lembaga sosial lokal dan aktivitas budaya. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI, 2011) telah berusaha mengkaji sebuah perencanaan komunitas yang bersahabat bagi lansia. Kajian ini didasari oleh masih kurangnya kesadaran pemerintah, masyarakat sipil dan LSM terhadap ekspektasi persoalan mengenai populasi lansia. Kajian ini mendiskusikan isu dan pelayanan utama yang dapat menjamin keberlanjutan kehidupan lansia dalam mencapai kesejahteraan melalui pengembangan komunitas lansia. Tahun 2006, Alex Arifianto meninjau kebijakan perlindungan sosial bagi lansia pada masa lalu dan sekarang serta kajian tentang dampak penyediaan jaminan sosial yang pantas bagi lansia dalam konteks Indonesia. Kesimpulan makalah ini adalah rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna melindungi lansia di masa yang akan datang (Arifianto, 2006).

Tulisan ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah dilakukan di atas. Kajian jaminan sosial dan pemberdayaan merupakan dua sisi yang berbeda, dimana landasan pijakan berawal dari paham yang berseberangan. Walaupun demikian, dalam konteks peningkatan kualitas hidup lansia, keduanya memiliki tujuan yang dapat dipertemukan. Jaminan sosial cenderung melibatkan pemerintah sebagai pemberi bantuan, sedangkan sektor informal dan masyarakat merupakan pihak yang memberi kesempatan lansia untuk masih beraktivitas.

Peran dominan yang ditunjukkan oleh sektor informal melalui aktivitas sosial dan budaya merupakan masukan penting untuk memahami mekanisme jaminan sosial yang selama ini sering diperoleh lansia. Aktivitas sosial dan budaya masyarakat secara langsung

maupun tidak langsung diartikan sebagai pranata sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan lansia karena mengandung sistem nilai, norma, prosedur umum dan sistem hubungan (Horton dan Hunt, 1987 dalam Narwoko dan Suyanto, 2007: 217). Nilai-nilai keterlibatan lansia dalam aktivitas tersebut memberikan kesempatan lansia untuk menjaga eksistensi mereka. Menjaga lansia tetap beraktivitas adalah komponen utama yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan jaminan sosial bagi lansia. Dengan demikian, guna menjaga aktivitas lansia maka diperlukan jaminan sosial alternatif.

Skema pemberdayaan diharapkan memiliki nilai jaminan sosial bagi lansia. Hubungan upaya pemberdayaan lansia dan jaminan sosial ini dapat digambarkan dalam beberapa bentuk. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana skema pemberdayaan memiliki nilai jaminan sosial bagi lansia. Dengan demikian, tulisan ini memberi gambaran skema jaminan sosial dari proses pemberdayaan, sehingga mampu menjadi masukan pada berbagai *stakeholder* dalam memahami keadaan lansia. Selain itu, diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap perspektif pemberdayaan dari sudut pandang penciptaan jaminan sosial.

## PEMBAHASAN

### Sejenak Memahami Lansia

Aspek demografi memiliki beberapa komponen kategori kependudukan yang diklasifikasikan berdasar usia. Salah satu klasifikasi penduduk adalah penduduk usia anak atau belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif. Lansia digolongkan dalam penduduk usia tidak produktif dengan definisi umum di Indonesia adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun (Prayitno, 1982:49). Pada dasarnya definisi mengenai lansia cukup variatif, sehingga belum ada definisi yang mampu menggambarkan pengertian lansia secara sempurna.

*In Psychosocial perspective, aging is defined here as the transformation of the human organism after the age of physical maturity so that the probability of survival decreases & it is accompanied by regular transformations in appearance, behavior, experience & social roles (Anonim, dalam Theories of Aging, 2010).*

Perspektif psikososial menggambarkan adanya pengaruh dengan fungsi ketahanan (Cohen & Willis, 1985), meliputi cara seseorang dengan dukungan sosial, model penyelesaian kesulitan yang berhasil dan tingginya keadaan psikososial berfungsi mengurangi dampak pada penyakit (Yang & Glaser, 2000, dalam Anstey, Luszcz dan Andrews, 2002:74). Dengan demikian keadaan psikososial lansia ini akan berpengaruh dengan keadaan fisik, baik kemampuan maupun status kesehatan lansia.

Perubahan yang dialami lansia baik secara fisik, psikologis, dan sosial adalah karakter pembeda utama dengan usia produktif. Penurunan kemampuan mereka seharusnya tidak menjadi justifikasi bahwa lansia tidak lagi produktif. Jumlah lansia yang bekerja masih cukup tinggi, biasanya di sektor informal, hal ini menunjukkan lansia masih memiliki potensi untuk produktif sesuai dengan kemampuannya. Lansia harus didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*active ageing*), yaitu memelihara keberlanjutan secara fisik, psikologis, kesehatan sosial, partisipasi, kebebasan, kemandirian, dan pengaturan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Bowling, 2005:230).

Reduksi kemampuan finansial dan sosial sangat berpengaruh pada keadaan fisik dan psikologis lansia, sehingga untuk menjaga kualitas hidup lansia maka mereka harus tetap berada dalam aktivitas sosialnya. Partisipasi lansia merupakan kunci utama untuk menjaga peran mereka dalam kehidupan sosial. Aktivitas ini akan berimplikasi pada keberlanjutan pemenuhan kebutuhan mereka, termasuk proses skema penyediaan jaminan sosial atas karakter kebutuhannya. Dalam teori aktivitas

Tabel 1  
Kerentanan Lansia dari Beberapa Aspek (Perspektif Psikososial)

No.	Aspek Karakter	Konteks Kerentanan
1	Ekonomi ( <i>Economic Aspect</i> )	Kehilangan pekerjaan/jabatan ( <i>economic deprivation</i> ) Kehilangan pendapatan ( <i>income</i> berkurang)
2	Fisik ( <i>Physical Aspect</i> )	Reduksi fisik-kesehatan, penyakit kronis dan ketidakmampuan Meningkatnya biaya hidup, (untuk) bertambahnya biaya pengobatan Gangguan saraf pancaindra, timbul kebutaan dan ketulian Gangguan gizi akibat perubahan pola aktivitas
3	Psikologis ( <i>Psychology Aspect</i> )	Perasaan dekat dengan kematian ( <i>sense of awareness of mortality</i> ) perubahan terhadap gambaran diri, perubahan konsep diri, biasanya merasa tidak berguna.
4	Hubungan sosial ( <i>Social Relationship Aspect</i> )	kehilangan status (dulu jabatan cukup tinggi, lengkap dengan segala fasilitasnya) kehilangan kegiatan kehilangan teman, kenalan atau relasi (dikarenakan pensiun atau teman sebaya telah meninggal) kehilangan hubungan dengan teman-teman dan <i>family</i> (ditinggal keluarga -anak- karena telah hidup mandiri)

Sumber: Disarikan dari perubahan sosial usia lanjut (Prayitno, 1982: 49-52)

disebutkan bahwa terdapat hubungan kuat antara partisipasi dan tingkat kepuasan. Teori aktivitas dimaknai sebagai pengaturan atau pengelolaan peran dan aktivitas sosial yang sangat bermakna bagi seseorang meningkatkan perasaan kesejahteraan pada usia lanjut (Havighurst and Albrecht 1953; Lemon, dkk., 1972, dalam Bowling, 2005:3). Dengan demikian, skema pemberdayaan yang berbasis karakter lansia dapat menjadi alternatif guna menjaga keberlanjutan kehidupan lansia di saat jangkauan jaminan sosial formal belum mereka terima.

Karakter lansia memang cukup bervariasi yaitu lansia yang tinggal di wilayah perdesaan dan perkotaan memiliki pola hidup yang berlainan. Akan tetapi, proses pemberdayaan yang digunakan sebagai bagian dari upaya menjalankan skema jaminan sosial ini akan tetap mampu merepresentasikan karakter lansia di kedua wilayah tersebut. Diskursus yang harus diperhatikan adalah memahami lansia di Indonesia dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu perspektif jaminan sosial dan pemberdayaan. Pemahaman inilah yang menjadi basis teoretis dalam menggambarkan

komprehensivitas skema jaminan sosial melalui aktivitas pemberdayaan.

### Jaminan Sosial dan Pemberdayaan: Antara Charity dan Participatory

Definisi umum jaminan sosial dan pemberdayaan memang berbeda, serta memiliki konteks yang berbeda pula. Menurut Midgley (2000:220), definisi jaminan sosial dapat diacu dari beberapa jenis program jaminan sosial yang berbeda, yaitu dikategorikan ke dalam skema asuransi sosial, bantuan sosial, hutang atau beban pekerja, dan tunjangan sosial. Menurut ILO (1984; dalam von Benda-Beckman, 2000:12) membatasi definisi jaminan sosial sebagai perlindungan yang disediakan masyarakat atau organisasi kepada anggotanya, yaitu rangkaian pengukuran umum menghadapi gangguan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh terhenti atau menurunnya pendapatan serta keadaan tersebut dapat dikarenakan sakit, persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, pemecatan, hari tua, kematian, persediaan perhatian medis, dan penyediaan tunjangan untuk keluarga bersama anaknya. Sasaran penerima jaminan

sosial ini adalah pihak-pihak yang mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhannya. Sifat perlindungan yang diberikan oleh negara bersifat pemberian atau *charity*, hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup warga negaranya.

Jaminan sosial yang bersifat *charity* cenderung tidak memberikan proses pembelajaran bagi masyarakat untuk mampu lepas dari kerentanan yang mereka hadapi dan besar kemungkinan bahwa akan menumbuhkan sikap ketergantungan pada negara, tetapi skema jaminan sosial ini memang diperlukan oleh masyarakat miskin. Lansia memiliki karakter kerentanan unik dan memerlukan skema jaminan sosial yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Lansia diharapkan tetap berada dalam lingkungan sosialnya untuk menjaga kepastian pemenuhan kebutuhan. Keadaan tersebut seperti berikut di bawah ini.

*“if many of the processes and problems of ageing are to be understood, old people must be studied as members of families (which usually means extended families of three generations); and if this is true, those concerned with health and social administration must, at every stage, treat old people as an inseparable part of a family group, which is more than just a residential unit. They are not simply individuals, let alone ‘cases’ occupying beds or chairs. They are members of families and whether or not they are treated as such largely determines their security, their health, and their happiness”* (Peter Townsend dalam Phillipson, dkk., 2001:20-21).

Salah satu upaya yang memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap beraktivitas adalah melalui proses pemberdayaan. Pemberdayaan lansia berperan menjaga kontribusi lansia dan proses ini bersifat partisipatif. Pemberdayaan adalah konsekuensi partisipasi dalam kegiatan kolektif dan pencapaian pengelolaan yang lebih luas atas sumber daya untuk penghidupan manusia. Dalam hal ini, hubungan sosial dan kelembagaan merupakan hal penting

karena mereka dapat berkontribusi kepada individu atau rumah tangga. Pemberdayaan mengacu pada “organisasi masyarakat miskin-sendiri (mandiri)” sebagai upaya bertahan, menyediakan kebebasan, dan mendapatkan wewenang dalam mengelola sumber untuk penghidupan (Friedman, 1996 dalam Lyons, 2001: 1234--1235).

Pemberdayaan lansia merupakan salah satu upaya untuk menciptakan skema perlindungan sosial supaya mampu menjaga keberlangsungan mereka dalam pemenuhan kebutuhan. Tujuan utama skema pemberdayaan adalah menjaga bagaimana lansia mampu tetap beraktivitas, walaupun produktivitas lansia tidaklah setinggi pada usia muda (produktif). Interaksi yang terjadi pada aktivitas pemberdayaan akan memberikan peluang bagi lansia untuk membentuk hubungan dan peran sosial yang baru, sehingga pola hubungan ini akan membantu lansia pada aspek psikologis (perasaan tidak berguna dan perasaan kesendirian). Pencapaian lain diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi, setidaknya berfungsi untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan dan tabungan ketika mereka berada pada keadaan mendesak (*insecurity saving*).

Partisipasi lansia pada proses pemberdayaan memiliki makna universal dalam menciptakan skema jaminan sosial bagi diri mereka sendiri, yaitu yang distimulasi dari aktivitas lansia. Keterbatasan jangkauan pemerintah dalam menciptakan jaminan sosial merupakan pijakan untuk membangun sebuah skema pemberdayaan yang sekaligus mampu menciptakan jaminan sosial. Pembelajaran melalui pemberdayaan lansia ini dapat menjaga eksistensi lansia untuk tetap berkreasi. Proses pemberdayaan membutuhkan beberapa pertimbangan, seperti keterlibatan antar-generasi, jenis aktivitas atau usaha, dan stakeholder yang terlibat. Dengan demikian, lansia tidak lagi selalu dipahami sebagai pihak yang tidak produktif dan hanya menjadi beban bagi usia produktif.

Pendekatan partisipatif sangat bertolak belakang dengan pendekatan skema jaminan sosial yang selama ini dilakukan secara masif. Pelayanan sosial dan jaminan sosial bagi lansia yang diberikan oleh pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk mencakup pendekatan pemberdayaan pula, tetapi jangkauannya sangat terbatas, sehingga mayoritas lansia di Indonesia belum mendapatkan pelayanan tersebut. Selama ini, persoalan lansia hanya ditangani oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, padahal sangat membuka peluang departemen lain untuk memiliki program yang dapat disinergikan. Artinya adalah perlu adanya kajian komprehensif dalam memahami persoalan lansia di Indonesia dan *master plan* upaya atau program untuk mengatasi persoalan Indonesia yang memasuki era penduduk berstruktur lanjut usia (*ageing structured population*).

### **Menggagas Pemberdayaan Lansia Sebagai Bagian Jaminan Sosial**

Penanganan persoalan tingginya lansia merupakan kajian komprehensif yang harus melibatkan beberapa aspek dan berimplikasi pula dengan pihak terkait yang berkompeten untuk mengatasi persoalan tersebut. Skema pelayanan sosial dan jaminan sosial di bawah pengelolaan Departemen Sosial belum mampu menjangkau seluruh lansia terlantar, apalagi seluruh lansia di Indonesia. Program pelayanan sosial dan jaminan sosial bagi lansia memang sangat bervariasi dan dilihat juga dari berbagai aspek, tetapi masih sangat jauh dari kebutuhan lansia.

Program jaminan sosial dan bantuan sosial lain seperti Askeskin, Raskin, BLT, PKH, BOS, dan KMS diperuntukkan pada kelompok masyarakat hanya dengan kriteria miskin, belum membedakan antara usia produktif dengan lansia. Keadaan ini akan menimbulkan setidaknya dua aspek persoalan, yaitu secara administratif dan substantif. Secara administratif menimbulkan kerancuan pada data jumlah lansia yang telah

mendapatkan pelayanan sosial lanjut usia. Secara substantif bahwa karakter kebutuhan antara lansia dengan kelompok usia produktif tidaklah sama, sehingga bantuan sosial tidak akan optimal untuk mengurangi kerentanan pada lansia. Lansia diharapkan memiliki kemandirian dalam mengatasi semua persoalan yang dihadapinya, baik persoalan fisik, kesehatan, sosial, dan psikologis. Bagaimanapun, realisasi penuh dalam mengembangkan individu mereka sendiri tidak dapat terwujud tanpa ketersediaan penyeimbangan dan aktivitas pemberdayaan oleh sektor masyarakat yang lain (Kennie, 1993:21).

Dengan melihat karakter lansia yang unik seharusnya lansia tidak dipahami secara kaku, artinya tidak semua lansia tidak potensial untuk produktif. Secara psikososial bahwa partisipasi adalah poin penting dalam membantu lansia yang potensial di dalam mengatasi kerentanan mereka, sehingga proses pemberdayaan akan memberikan peluang mereka untuk beraktivitas. Pola pemberdayaan memang cenderung usaha yang produktif, tetapi harus disesuaikan pula dengan kemampuan lansia. Selama ini memang telah ada bantuan usaha dari pemerintah untuk usaha mikro dan seringkali hanya dikhususkan kepada usia produktif. Sederhananya memang, tetapi dianggap berisiko dengan keadaan lansia yang mulai mengalami penurunan kemampuan untuk dapat berproduksi secara maksimal, tetapi pembagian kerja dapat disesuaikan dengan kapasitas lansia. Jenis kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan karakter lingkungan sosial dimana lansia tinggal.

Pengembangan usaha produktif adalah kewenangan Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan untuk proses pembentukan distribusi pasar harus melibatkan Departemen Perdagangan, sehingga perlu diupayakan integrasi dari departemen-departemen terkait. Departemen Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan

jaminan sosial seharusnya memiliki *master plan* atas pemahaman jaminan sosial yang sesuai dengan karakter lansia berdasar keadaan psikososial dan fisiknya. Pelayanan sosial dan jaminan sosial bagi lansia tetap harus dijalankan dengan catatan perlu ada pembenahan data administratif supaya tidak terjadi duplikasi penerimanya. Mekanisme yang berbasis pemberdayaan dan lokalitas harus diutamakan untuk memberikan porsi lebih besar pada partisipasi lansia. Prioritas tersebut harus disinergikan pada Depnakertrans dan Deperindagkop untuk dapat disusun program pemberdayaan produktif bagi lansia. Aktivitas produktif dapat dilakukan di lingkungan komunitas atau di luar panti (non-panti) maupun di dalam panti.

### **Usaha Mikro Berbasis Sumberdaya Lokal**

Pola pemberdayaan yang dikembangkan harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti potensi karakter wilayah, struktur sosial demografi, dan pelaku lintas generasi. Basis potensi lokal adalah pertimbangan rasional dalam menciptakan usaha yang memiliki peluang lebih besar untuk dapat dijalankan. Potensi lokal ini tidak hanya dilihat hasil alamnya, tetapi juga dari potensi sumber daya manusia dan aksesibilitas lingkungan dengan pihak eksternal. Struktur sosial demografis diharapkan menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi upaya pemberdayaan, yaitu wilayah dengan rasio penduduk lansia yang tinggi dan tergolong dalam wilayah yang rentan (angka kemiskinan tinggi). Skema pemberdayaan dijalankan pula oleh lintas generasi, artinya integrasi antara usia produktif, pra-lansia, dan lansia.

Pendekatan berorientasi komunitas berupaya agar sistem produksi mengacu kepada kebutuhan masyarakat dan komunitas (Korten, 1984). Beberapa ciri dari pendekatan ini adalah antara lain logika yang menonjol

adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumberdaya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis, serta sasaran yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka terealisasikannya potensi umat manusia (Soetomo, 2009:242). Upaya pemberdayaan lansia diharapkan berbasis pada potensi dan kebutuhan yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian, pendekatan ini relevan demi menjaga keberlanjutan usaha dan menyesuaikan dengan karakter lansia di suatu wilayah.

Pertimbangan keadaan sosial demografis menjadi titik penting untuk melihat bagaimana seharusnya komposisi yang akan dibangun dalam skema usaha. Selain pengembangan usaha sesuai dengan potensi wilayah, *Pertama*, komposisi manajerial atau pihak yang menggerakkan sirkulasi usaha adalah komponen utama supaya arus ekonomi dapat berkelanjutan. *Kedua*, pertimbangan mekanisme bantuan yang digulirkan. Pertimbangan kedua ini tidak lepas dari aspek pemberdayaan lansia. *Ketiga*, bahwa bantuan yang diberikan sebagai upaya pemberdayaan lansia disesuaikan dengan prosentase keterlibatan lansia dengan kelompok usia lain yang beraktivitas pada ekonomi kecil.

*Cross generation* adalah komponen terakhir dalam upaya pemberdayaan lansia, dalam hubungan ini akan memunculkan jaringan sosial dan dukungan sosial. Jaringan sosial (*social network*) diidentifikasi sebagai sebuah instrumen pertalian di antara kelompok identitas masyarakat dan karakteristiknya yang memiliki beberapa kekuatan penjelas atas perilaku sosial keterlibatan masyarakat. Jaringan sosial merupakan kumpulan orang-orang yang menjalin hubungan dan membentuk sebuah ikatan sosial. Dukungan sosial didefinisikan sebagai proses interaksi yang didalamnya terkait secara emosional, instrumental,

dan bantuan finansial dari jaringan sosial seseorang (Bowling, dalam Phillipson, Bernard, Phillips, Ogg, 2001:26). Dukungan sosial bagi lansia dalam mengurangi kerentanannya ini terbangun dari hubungan jaringan sosial lintas generasi antara lansia dan usia produktif lain.

Pemberdayaan lansia pada sektor produktif memberikan keuntungan secara ekonomis pula dengan memperoleh pendapatan dari usaha tersebut. Pendapatan ini dapat menjadi tabungan bagi lansia untuk mempersiapkan diri menghadapi keadaan *insecurity*. Selain aktivitas produktif, pemberdayaan lansia meningkatkan pengalaman lansia yang berimplikasi pada peningkatan pengetahuan mereka. Pengalaman ini mengacu pemahaman subyektif seseorang terhadap situasi kehidupannya dan ini sebuah proses bahwa aktivitas hidup seseorang menjadi sangat bermanfaat, subyektif, dan tabiat khusus secara individu (Brown, 2004:58). Pengalaman atas aktivitas yang bermanfaat melalui berbagai informasi dapat meningkatkan pengetahuan lansia, terutama pada aspek kesehatan dan ketrampilan. Pemahaman inilah kemudian mempengaruhi pola perilaku lansia dengan pengetahuan yang baik, maka perilaku lansia dalam menjaga kualitas hidup mereka pun akan baik pula.

### **Aktivitas Kreatif Berbasis Panti**

Panti sosial menjadi tempat alternatif bagi lansia untuk memiliki komunitas. Sistem panti adalah bentuk pelayanan yang menempatkan penerima pelayanan ke dalam suatu lembaga tertentu (panti), sedangkan luar panti (non-panti) merupakan bentuk pelayanan yang menempatkan penerima pelayanan di luar lembaga tertentu (panti) misalnya keluarga, masyarakat, dan lain-lain (Dinsos Yogyakarta, 2005). Aktivitas kreatif yang dikembangkan dalam panti ini berbeda dengan usaha kecil yang dilakukan di masyarakat (non-panti).

Panti jompo tidak hanya sebagai rumah pelayanan sosial bagi lansia yang secara sengaja mengaksesnya disebut dengan klien, tetapi diperuntukkan pula bagi lansia terlantar yang berfungsi sebagai rumah perlindungan sosial. Lansia terjaga dalam lingkungan komunitasnya membuka peluang dalam berinteraksi dan beraktivitas bersama. Panti memiliki berbagai program pelayanan sosial, tidak sekedar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesehatan, tetapi berkaitan pula dengan keadaan psikologis dan sosial. Dengan demikian, lansia diharapkan mampu lebih berbudaya.

Pengembangan program panti sebagai pengembangan kapasitas lansia melalui usaha kreatif juga dapat dilakukan, seperti pembuatan kerajinan (*handicraft*) dan ketrampilan lain. Panti menjadi wadah bagi lansia guna memperoleh kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Panti adalah kunci dalam menyediakan pelayanan kesehatan, kesejahteraan dan kemandirian bagi lansia, walaupun masih banyak panti memiliki perlengkapan yang kurang memadai (Kennie, 1993:229). Kekurangan yang dimiliki panti dari aspek kelengkapan fisik, aktivitas maupun program sehingga mayoritas panti hanya memiliki rutinitas yang biasanya membosankan bagi lansia.

Harapan besar bahwa lansia dapat menyalurkan hobi atau setidaknya memiliki aktivitas produktif. Kerajinan dapat berupa produk kerajinan sejenis souvenir yang sederhana. Ketrampilan lain lansia sebagai bagian dari aktivitasnya seperti membuat makanan ringan. Hasil kerajinan maupun ketrampilan ini dapat difasilitasi oleh panti untuk dipasarkan, sehingga aktivitas ini pun menghasilkan keuntungan dari sisi finansial dan dapat dirasakan oleh lansia yang bersangkutan. Produk makanan ringan selain dipasarkan juga dapat dikonsumsi sendiri oleh warga panti, sehingga mereka mampu berinovasi dan sebagai hiburan adanya variasi jenis makanan.

### **Aktivitas Sosial atau Sukarelawan**

Menurunkan aktivitas lansia bagi yang bekerja pada sektor formal dan diiringi menurun juga kemampuan fisik mereka, maka mereka tidak akan mampu melakukan aktivitas seperti waktu sebelumnya. Pensiun memberikan implikasi meningkatnya waktu luang dan pendapatan mereka. Konsekuensi logis ketika dihadapkan dengan penurunan finansial karena waktu bekerja mereka pun hilang, tetapi peningkatan waktu luang mereka akan menyebabkan kehidupan mereka tidak sehat. Dengan demikian, pada dasarnya mereka membutuhkan wadah untuk melakukan suatu aktivitas. Menurut Ekerdt (1986) bahwa aktivitas sukarelawan relevan dengan “etika sibuk” yang terbentuk oleh pensiunan modern dan ditambahkan oleh Havighurst (1963) menunjukkan keadaan ini layaknya keterlibatan yang dikenalkan dalam teori aktivitas (Settersten and Angel, 2011:333). Alternatif aktivitas tidak harus sejalan dengan aktivitas mereka terdahulu, melainkan mampu mengurangi waktu luang mereka tanpa aktivitas.

Terdapat persoalan psikologis ketika lansia hanya bergelut dengan kevakuman minimnya aktivitas dan rasa kepuasan atas hidup tidak akan lagi mereka rasakan. Kepuasan dapat digambarkan dari aktivitas dan pencapaian, walaupun tidak berlaku sepenuhnya dalam pemenuhan kebutuhan (primer) yang mengikat pada aktivitas tertentu. Kepuasan seringkali dimaknai sebagai hasil waktu luang atau hubungan sosial yang berkaitan dengan partisipasi yang lebih memuaskan dari pada aktivitas pekerjaan itu sendiri (Manzvelt, 1997:292). Di sisi lain, perubahan juga terjadi pada aspek psikologis, yaitu perubahan konsep diri yang merasa tidak berguna, perasaan dekat dengan kematian, dan kesendirian. Perasaan kesendirian ini disebabkan menurunnya kemampuan lansia untuk menciptakan relasi sosial karena banyak teman sejawat mereka yang telah meninggal dan ditinggal keluarganya (anak) untuk hidup mandiri.

Aktivitas sosial yang lansia lakukan dapat menjadi seorang sukarelawan atau tenaga honorer dengan perincian tugas sesuai kemampuan mereka. Dalam hal ini memang tidak akan menghasilkan materi layaknya mereka bekerja penuh waktu sebelumnya. Sebagai pekerja honorer bisa diwadahi oleh institusi pemerintah maupun swasta, sedangkan sebagai sukarelawan dapat diwadahi oleh organisasi sosial seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuan utama menempatkan lansia pada posisi ini bukan semata-mata karena ekonomi, melainkan menjaga eksistensi lansia dalam membangun kebutuhan sosial mereka. Skema ini cenderung diperuntukkan bagi seorang pensiunan yang masih ingin beraktivitas, baik dari institusi pemerintah ataupun swasta. Aktivitas ini dapat dianggap sebagai sebuah rekreasi pula, peran ini diharapkan mampu mengisi peran lansia yang hilang (Musick and Wilson, 2008; dalam Settersten and Angel, 2011:333). Aktivitas sukarelawan ini tidak lepas dari aktivitas berhubungan dengan pihak lain, sehingga akan menjaga relasi sosial terhadap sesamanya maupun lintas generasi.

Relasi sosial menciptakan dukungan bagi lansia disaat mereka telah mengalami penurunan kemampuan dalam membentuk relasi sosial yang baru. Dukungan sosial dihubungkan dengan pengaruh positif seperti meningkatkan perasaan memiliki, keakraban, meninggikan penilaian diri dan peningkatan kemampuan kontrol, serta menjadi sumber informasi yang meningkatkan keberhasilan dalam mengatasi kesulitan (Fiksenbaum, 2005:3). Relasi dan dukungan sosial tersebut mampu mengatasi persoalan lansia yang berhubungan dengan kemampuan penciptaan hubungan sosial baru dari aspek psikologis tentang konsepsi atas dirinya.

Sejenak menilik program bagi lansia dari negara Jepang dan Singapura. Lansia di Jepang disediakan sebuah taman kota yang khusus diperuntukkan bagi lansia

dan dikelola sendiri oleh lansia. Taman kota ini menjadi pusat aktivitas lansia dan mendapatkan gaji dari pemeliharaan taman tersebut. Lansia beraktivitas dengan membersihkan taman, menghiasi taman dengan bunga-bunga, atau hanya berjalan-jalan. Di Singapura, lansia yang telah pensiun mendapat kesempatan aktif di lembaga sosial sebagai sukarelawan atau tenaga honorer. Materi yang mereka peroleh memang tidak besar, tetapi tetap mampu melakukan aktivitas yang membuka kesempatan bagi pemenuhan kebutuhan psikososial mereka.

Menurut direktur pelayanan sosial usia lanjut kementerian sosial (Societa, 2011:12), pemerintah telah meluncurkan program "kota yang bersahabat dengan lansia" yang dilakukan pertama kali di Jawa Timur. Program ini diikuti beberapa daerah lain di Jawa Barat, Bukittinggi, Gorontalo, Jawa Tengah, Palu, Manado, dan Sentani. Daerah-daerah tersebut telah memiliki dan mengembangkan taman kota serta fasilitas yang berorientasi dengan kebutuhan lansia. Progres program pemerintah sudah sepantasnya diapresiasi dengan baik, tetapi jangkauannya belum secara universal bagi lansia di Indonesia sehingga masih memerlukan inovasi program. Dengan kata lain, jangkauan perlindungan sosial bagi lansia harus ditingkatkan, terutama mereka yang kurang mampu dan beraktivitas di sektor informal.

Di Indonesia belum familiar untuk menempatkan lansia sebagai tenaga honorer atau diperbantukan untuk sukarelawan, padahal tidak semua dari mereka sudah tidak lagi produktif. Perencanaan taman kota di Indonesia belum menunjukkan dampak signifikan karena tidak seluruh wilayah memiliki taman kota yang dikelola oleh lansia. Belum adanya integrasi aktivitas sosial lansia yang dikelola dinas sosial dengan dinas lain mengakibatkan lansia hanya memiliki aktivitas di dalam panti dan belum terlibat dalam aktivitas sukarela di luar panti.

Pengelolaan taman kota biasanya dilakukan oleh pemerintah setempat melalui SKPD atau dinas pekerjaan umum. Dinas sosial seharusnya berkoordinasi dengan pengelola taman kota untuk mengembangkan aktivitas lansia untuk berperan mengelola taman kota.

Aktivitas sosial sebagai instrumen mengatasi persoalan yang dihadapi lansia, sekaligus peningkatan kualitas hidup. Peningkatan ini diharapkan mampu menjembatani lansia untuk menjadi lansia yang sukses. Seperti pendapat M. von Faber (2001, dalam Bowling, 2005:6) mengenai lansia berhasil (*successful ageing*), yaitu:

*"These include: having the physiological and psychological abilities of younger people, and engaging with life; reaching one's potential and achieving physical, psychological and social well-being; the ability to adapt one's values to meet the challenges of later life; maintaining a realistic sense of self; employing various compensatory and accommodative strategies in the face of depleting reserves; cognitive efficiency; psychological resources built up over a lifetime; self-mastery; control; maintenance of productivity; achievement; and, simply, a sense of being, coupled with optimum functioning"*

Perspektif penuaan produktif, sukarelawan menjembatani -bersama dengan bekerja dan perlindungan- sebagai kegiatan yang harus dipromosikan karena menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat ((Morrow-Howell, Hinterlong, and Sherraden, 2001; dalam Settersten and Angel, 2011:334).

## SIMPULAN

Jaminan sosial formal bagi lansia yang disediakan negara selama ini memang masih sangat terbatas. Tingginya jumlah penduduk lansia yang di luar jaminan sosial formal merupakan persoalan serius dan Indonesia pun mulai memasuki *age population structured* sehingga ketika lansia semakin besar akan mempengaruhi kebijakan. Begitu pula program perlu kajian yang mendalam karena karakter kebutuhan lansia yang berbeda

dengan kebutuhan kelompok usia yang lain. Perspektif psikososial lansia menunjukkan lansia adalah kelompok usia yang rentan dari berbagai aspek, baik ekonomi, fisik, sosial, dan psikologis. Ketika jaminan sosial belum mampu menjangkau seluruh lansia, maka pemerintah harus menyiapkan alternatif program guna menjaga kualitas kehidupan lansia.

Lansia yang mengalami penurunan kemampuan dalam aspek psikososialnya menekankan bahwa lansia mengalami kerentanan karena hilang atau berkurangnya aktivitas mereka. Partisipasi lansia menjadi titik penting untuk menjaga aktivitas lansia, yaitu alternatif utama melalui skema pemberdayaan lansia. Melalui pemberdayaan lansia akan dihasilkan beberapa nilai penting, yaitu aktivitas bagi lansia, penciptaan hubungan sosial, dan pendapatan bagi lansia. Aktivitas yang dilakukan lansia ini akan mengurangi waktu luang lansia yang terbuang tanpa melakukan apapun, maka akan mengurangi pula perasaan bosan dan kesepian. Hubungan sosial yang tercipta akan berimplikasi luas pada kehidupan lansia, dimana sangat berkaitan dengan aspek psikologis dan fisik lansia. Dengan demikian, pemberdayaan lansia membentuk pola aktivitas lansia yang bermanfaat mengisi waktu luang, menciptakan hubungan sosial, mengurangi perasaan kesendirian, menjaga hubungan timbal-balik antara lansia dengan lingkungannya, menambah pendapatan, menjaga eksistensi diri dan meningkatkan kapasitas terkait kesehatan maupun ketrampilan lansia. Hasil dari pemberdayaan lansia tersebut merupakan nilai-nilai tujuan diselenggarakannya jaminan sosial.

Wacana pemberdayaan lansia sebagai bagian dari jaminan sosial memang bukan hal sederhana, bahkan memerlukan perencanaan yang komprehensif. Universalitas perencanaan ini meliputi kajian perencanaan secara holistic dan masif, melibatkan berbagai stakeholder pemerintah (departemen/kementrian), serta

jenis aktivitas pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan lansia sudah seharusnya disesuaikan dengan karakteristik lokal dalam hal wilayah (alam) dan karakter kemampuan lansia itu sendiri.

Pemahaman mengenai pemberdayaan lansia yang mampu menciptakan nilai jaminan sosial, dimana potensi kerentanan lansia harus dipahami secara universal dari berbagai aspek karena perubahan secara biologis memengaruhi keadaan psikologis dan pola perilaku, serta terjadi perubahan lingkungan sosial lansia tersebut. Pola pemberdayaan lansia memberi kesempatan kepada lansia untuk tetap berpartisipasi aktif dalam sebuah kegiatan. Dalam hal ini akan membentuk hubungan sosial antara lansia dengan lingkungan sosial, sehingga dapat mereduksi kerentanan yang dialami lansia. Terdapat alternatif pemberdayaan lansia yang mampu menjadi wadah aktivitas lansia yaitu aktivitas sektor produktif (panti maupun non-panti) dan aktivitas sosial sebagai sukarelawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011, *Designing Age Friendly Communities To Enhance Aging in Place*, Artikel Seminar tanggal 13-14 Oktober 2011 di Sanur, Bali diselenggarakan oleh National Committee for Older Person Indonesia, Diunduh dari <http://www.kopertis3.or.id/html/wp-content/uploads/2011/07/leaflet-aipi.pdf> pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 19.04 WIB.
- Anonim, 2010, *Theories of Aging*, Diakses dari <http://www.angelfire.com/ns/southeasternnurse/TheoriesofAgingC3.html> pada tanggal 23 Februari 2011 pukul 11.15 WIB.
- Anstey, K. J., 2002, *Psychosocial Factors, Gender and Late-life Mortality* dalam *Ageing International*, Spring 2002, Vol. 27, No. 2, p. 73-89, hlm.73.
- Arifianto, A., 2006, *Public Policy Towards*

- the Elderly in Indonesia: Current Policy and Future Directions*, Jakarta: SMERU Research Institute.
- Benda-Beckmann, 2000, *Coping with Insecurity: An "Underall" Perspective on Social Security in the Third World*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bowling, A., 2005, *Aging Well: Quality of Life in Old Age*, England: Open University Press.
- Brown, S, N H., 2004, *Care In The Community* dalam *BT Technology Journal*, Vol 22 No 3, July, hlm.58.
- Dinas Sosial DIY, 2005, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, Diakses dari <http://www.dinsos.pemda-diy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=60> pada tanggal 9 Januari 2012 pada pukul 10.35 WIB.
- Fiksenbaum, L, 2005, *A Psychosocial Model Of Functional Disability* dalam *Ageing International*, Summer 2005, Vol. 30, No. 3, pp. 278-295, hlm.280.
- Hirazawa, M., Kitaura. K., Yakita.A., 2007, *Aging, Fertility, Social Security, And Political Equilibrium*, Springerlink: *Journal Population Economic*, 2010, pp. 23, hlm. 559-569.
- Kedaulatan Rakyat, 2010, *2010-2020 Akan Terjadi Ledakan Lansia di Indonesia*, Diakses dari <http://www.galerigriya.com/2010-2020-akan-terjadi-ledakan-lansia-di-indonesia> pada tanggal 23 Februari 2011 pukul 15.50 WIB.
- Kennie, D. C., 1993, *Preventive Care For Elderly People*, New York: Cambridge University Press.
- Lyons, M., Smuts. C. and Stephens. A., 2001, *Participation, Empowerment, and Sustainability: (How) Do the Links Work?*, diakses dari <http://usj.sagepub.com/cgi/content/abstract/38/8/1233> tanggal 1 April 2009 pukul 09.35 WIB.
- Mansvelt, J., 1997, *Working at Leisure: Critical Geographies of Ageing*, Source: *Area*, Vol. 29, No. 4 (Dec., 1997), pp. 289-298
- Published by: Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers). Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/20003822>. Tanggal 14 April 2009 pukul 15.47 WIB, hlm.292.
- Midgley, J., 2001, *Social Security Policy in Developing Countries: Integrating State and Traditional Systems* dalam Benda-Beckmann, Frans von and Keebet von Benda-Beckmann and Hands, *Coping with Insecurity: An "Underall" Perspective on Social Security in the Third World*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narwoko dan Suyanto, 2007, *Sosiologi: Teks dan Terapan*, Bandung: Grasindo.
- Phillipson, C., 2001, *The Family And Community Life Of Older People: Social Networks And Social Support In Three Urban Areas*, London dan New York: Routledge.
- Prayitno, A, 1982, *Usia Lanjut dan Aspek Psikososialnya di Indonesia* dalam Idayu Press (ed), 1984, *Manula*, Jakarta: Idayu Press.
- Settersten, R. A., 2011, *Handbook of Sociology of Aging*, New York: Springerlink.
- Sitepu, J., 2010, "10 Ribu Lansia Mendapatkan Dana JSLU", Artikel diakses dari <http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=830> pada tanggal 23 Februari 2011 pukul 14.35 WIB.
- Societa (Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial), 2011, *Membuat Lansia Tetap Berdaya*, Edisi III, Jakarta: Biro Humas Kementerian Sosial RI.
- Societa (Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial), 2011, *Meretas Ketelantaran*, Edisi II, Jakarta: Biro Humas Kementerian Sosial RI.
- Soetomo, 2009, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sriyanto, E., 2009, *Pengembangan Jaminan Sosial Informal Bagi Lansia di Perdesaan Wonogiri*, Yogyakarta UGM: Tidak

dipublikasikan.

Tim Peneliti Jurusan Ilmu Sosiatri, 2008, *Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Tenun Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Lansia Dan Masyarakat*, Yogyakarta UGM: Tidak dipublikasikan.

Turner, Bryan S, 1989, *Ageing, Status Politics and Sociological Theory*/ Source: The British Journal of Sociology, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1989), pp. 588-606 Published by: Blackwell Publishing on behalf of The London School of Economics and Political Science Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/590890>, diakses pada tanggal 15 April 2009 pukul 11.43 WIB.

Yanrehsos, 70 *Pendampingan JSLU Mengikuti Program Pembekalan: Organisasi Hukum dan Humas*, Artikel diakses dari [www.yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=873](http://www.yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=873) tanggal 23 Februari 2011 pukul 15.30 WIB.